

BENTUK DINAMIKA PENYULUH AGAMA HINDU DI DKI JAKARTA

Untung Suhardi¹, Wayan Tantre Awiyan²

untungsuhardi18@gmail.com¹, wayantantre96@gmail.com²

Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta^{1 2}

Abstract

Keyword:

*The Dynamics;
Hindu; Instructor;
Strukturasi; Form;
Jakarta.*

The existence of counselors there in Jakarta in accordance with regulation of the ministry of religion in conduct training in accordance with. Tasks and functionsThe development of globalization drove very quickly both in the technology and science. The acceleration is relating to the digital age and circumstances. Culture nevertheless, the implementation of development by extension in Jakarta is still experiencing the dynamics of especially in the form of the dynamics of. Extension workersA method of adopting phenomenology and interpretive. Paradigm. Types of data, the data kualitatif, data source, a source of the primary data, and secondary data. Data analysis techniques with a model of a cycle by reduction, data the presentation of data and data verification. The theory that is used is a theory strukturasi (Gidden). This research result that the dynamics of counselors is going on in Jakarta is going on a policy extension, (good regulations recruits, to scatter, and educated in areas), extension , extension worker program reproduction, social and the existence of extension.

Abstrak

Kata Kunci:

*Dinamika; Hindu;
Penyuluh;
Strukturasi; Bentuk;
Jakarta.*

Eksistensi penyuluh yang ada di DKI Jakarta sesuai dengan regulasi dari Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perkembangan globalisasi melaju dengan sangat cepat baik dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Percepatan ini berkaitan dengan era digital dan keadaan budaya. Namun demikian, pelaksanaan pembinaan yang dilakukan penyuluh di DKI Jakarta masih mengalami dinamika terutama pada bentuk dinamika penyuluh. Metode menggunakan pendekatan fenomenologi dan paradigma interpretif. Jenis data, data kualitatif, sumber data, sumber data primer, dan sumber data sekunder. Teknik analisis data dengan model siklus melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Teori yang digunakan adalah teori strukturasi (Gidden). Hasil penelitian ini bahwa dinamika penyuluh yang terjadi di DKI Jakarta terjadi kebijakan penyuluh (baik regulasi, rekrutmen,

sebaran, dan wilayah binaan penyuluh), program penyuluh, reproduksi sosial, dan eksistensi penyuluh.

PENDAHULUAN

Pemahaman ajaran agama Pelaksanaan pembinaan agama Hindu ini juga tertuang dalam hasil pesamuan Agung PHDI Pusat di Yogyakarta pada tahun 1971 yang berisi pelaksanaan agama dan tatanan kehidupan sosial untuk menunjang kegiatan keagamaan (Atmadja, 2010). Dengan mengacu pada uraian ini, maka dapat dideskripsikan bahwa pelaksanaan keagamaan Hindu harus didasarkan dalam konsep vertical dan horizontal dan menjalankan tattwa, susila, dan acara, sehingga pelaksanaan agama tidak hanya terlihat dari kulit luar berupa ritual (Triguna, 2011). Padahal di dalam Bhagavadgita 9.26 tegas menyatakan bahwa kalau seseorang memepersembahkan daun, bunga, buah atau air dengan cinta bhakti Aku akan menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Hindu memberikan kelonggaran umatnya dalam menjalankan ritualnya yang justru penekanannya adalah pada ketulusikhlasan sesuai kearifan lokalnya. Parisada Pusat sendiri mempunyai Lembaga Dharma Duta dengan skala nasional dan sejauh ini, lembaga ini terkesan belum efektif karena sentuhannya belum dirasakan oleh umat Hindu, yang khususnya berada di luar wilayah Bali. Untuk di wilayah provinsi DKI Jakarta, Lembaga Dharma Duta belum dibentuk secara resmi, sementara tugas-tugas pembinaan umat ditangani dalam Bidang Keagamaan. Menjadi menarik, karena Parisada DKI memberikan mandat kepada setiap Parisada Wilayah (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur) untuk wajib menyampaikan dharma wacana, minimal untuk di wilayah masing-masing. Tentu ini sebuah keputusan yang memberikan harapan, dan patut diacungi jempol, karena akan “memaksa” para pengurus Parisada Wilayah untuk bekerja keras dan berani tampil dengan menyampaikan materi-materinya terkait dengan ajaran Hindu, yang relevan dengan gejolak kehidupan saat ini.

Studi literature yang pernah dilakukan juga dihadirkan oleh penulis untuk memberikan gambaran awal dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Putu Darmi Astuti (2018) dalam jurnal Penelitian Agama Hindu Vol. 2 No. 2 tahun 2018 dengan judul *Persepsi Masyarakat Terhadap Penyuluh Agama Hindu di Kecamatan Denpasar Selatan*. Fenomena eksistensi Penyuluh Agama Hindu PNS dan non PNS serta sosial keagamaan di zaman modern ini merupakan

tema yang menarik untuk diteliti, fakta bahwa masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan tidak dapat menghindari modernitas disinilah dituntut peran penyuluh dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan Agama Hindu sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan beragama (Astuti, 2018). Selain itu penelitian dari I Nyoman Sueca, (2018) dalam Jurnal Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu Vol. 5 No. 2 dengan judul *Penguatan Budaya Kerja Penyuluh Agama Non-PNS Dalam Pembinaan Umat Hindu Di Kabupaten Gianyar*. Budaya organisasi dalam sebuah lembaga baik pemerintah maupun swasta yang diterapkan dengan kuat dan positif akan menjadikan manajemen secara efisien dan efektif, karena menghasilkan hal-hal seperti; nilai, perilaku, adanya musyawarah (Sueca, 2018:61).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sugiman dan I Nyoman Santiawan (2020) pada jurnal Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu Vol. 25 No. 2 dengan judul *Kinerja Penyuluh Agama Hindu Non PNS Ditinjau Dari Fungsi Penyuluh Di Masa Pandemi Covid-19*. Temuan penelitian ini adalah Penyuluh mampu menjalankan fungsinya walaupun dalam kondisi pandemic covid-19. Hasil penelitian dari keempat fungsi tersebut adalah: 1) Penyuluh berperan aktif dalam menyapaikan informasi terkait peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19. 2) Penyuluh mampu menjalankan tugasnya dalam fungsi edukatif dengan melakukan penyuluhan/ pembinaan daring, membuat konten tulisan, membuat video pendek yang disebar di sosial media. 3) Penyuluh menjadi garda terdepan dalam menerapkan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan ibadah di rumah ibadah sesuai peraturan pemerintah. 4) Penyuluh memberikan pendampingan kepada umat yang terdampak Covid-19 dan warga yang menerima tuduhan terpapar Covid-19 (Sugiman dan I Nyoman Santiawan, 2020:154). Ni Nyoman Harnika (2021) pada jurnal Ganec Swara Vol. 15 No. 2 dengan judul *Efektifitas Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Hindu Non PNS Dalam Membina Keluarga Dharmika Di Kota Mataram*. Komunikasi yang dilakukan oleh penyuluh agama Hindu Non PNS dalam membina umat Hindu adalah komunikasi persuasif, komunikasi tersebut bertujuan untuk mempengaruhi umat Hindu khususnya keluarga darmika untuk dapat menjalankan ajaran agama sesuai sastra agama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perubahan sikap (*attitude change theory*). Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menjabarkan secara komunikasi persuasif penyuluh agama Hindu Non PNS dalam membina (Harnika, 2021:1142).

Kajian literature ini memberikan pemahaman kepada penulis tentang bentuk penelitian yang dilakukan yang pada posisinya adalah sebagai penelitian pengembangan dari penelitian yang sudah dilakukan. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya regulasi Lembaga Dharma Duta PHDI adalah Lembaga Keagamaan, yang dibentuk oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat dengan Surat Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI) Pusat Nomor: 34/SK/PARISADA PUSAT/II/2013, Tanggal 19 Pebruari 2013. Bertugas membantu Parisada Hindu Dhama Indonesia (PHDI) dalam membina umat Hindu diseluruh Indonesia melalui kegiatan Pencerahan/*Dharma Wacana* agama Hindu. Keberadaan inilah yang pada dasarnya telah dibentuk lembaga yang ada di setiap provinsi dan Kabupaten untuk membantu pembinaan umat yang ada di daerah. Adapun tugas pokoknya adalah Lembaga Dharma Duta PHDI, menyelenggarakan fungsi pembinaan rohani (Mental Spiritual), meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dalam rangka pembinaan kehidupan kerohanian, guna meningkatkan *sraddha* dan *bhakti* kepada Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, agar umat Hindu memiliki budi pekerti yang luhur, sesuai ajaran agama Hindu. Namun demikian keberadaan Lembaga *Dharma Duta* yang ada di DKI Jakarta belum dijalankan dengan optimal karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang secara khusus menangani hal ini. Hal yang terjadi kemudian adalah perlu bantuan yang bersinergi dengan para penyuluh yang ada di DKI Jakarta agar semua lembaga ini mampu untuk melengkapi satu dengan yang lain.

Tabel 1 Data Penyuluh Agama PNS dan Non PNS DKI Jakarta

Jumlah Juru Penerang Agama (Penyuluh) Menurut Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta 2018												
Kabupaten/Kota	Islam (PNS)	Islam (Non PNS)	Krist en (PNS)	Krist en (Non PNS)	Katolik (PNS)	Katolik (Non PNS)	Hindu (PNS)	Hindu (Non PNS)	Budha (PNS)	Budha (Non PNS)	Khonghuc (PNS)	Khonghuc (Non PNS)
Kep. Seribu	16	4	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Jakarta Selatan	95	44	0	7	1	2	0	9	0	-	0	0
Jakarta Timur	95	46	0	74	0	12	1	16	1	-	0	4
Jakarta Pusat	64	17	1	12	2	1	0	2	0	-	0	2
Jakarta Barat	64	16	1	22	0	1	0	3	1	-	0	2
Jakarta Utara	48	35	1	30	2	4	0	2	0	-	0	2
DKI Jakarta	382	162	3	145	5	20	1	32	2	0	0	10

Sumber: <https://jakarta.bps.go.id>, tahun 2020.

Hal awal yang perlu diperhatikan adalah munculnya bentuk penyuluhan yang bersifat kekinian, sehingga penyuluh yang direkrut harus mempunyai kecakapan pembinaan yang mengikuti dinamika zaman yang ada.

Faktor internal kedua adalah pendidikan atau pengetahuan penyuluh. Proses penyuluhan bahwa adanya jumlah penyuluh 33 (1 Penyuluh PNS dan 32 Non PNS) di mana pembagiannya dapat dianalisis dengan adanya kategori pendidikan, jenis kelamin, suku. Selanjutnya, diperlukan sebuah penataan sebagai upaya untuk mengelola atau *manage* semua potensi yang ada untuk mencetak dharma duta – dharma duta yang kompeten yang bermuara kepada peningkatan *śraddhā*; yang sejauh ini belum terlihat hasilnya. Keadaan ini juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan karena pembinaan juga melibatkan generasi muda yang pada suatu saat nanti akan menjadi pemimpin masa depan (Rahmawan, et.al, 2018:10).

Walaupun semua pihak menanggapi ini dengan positif; namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dipikirkan. Mewacanakan dharma memang tidak mudah, karena wacana-wacana ini baru akan menyentuh, jika si penyampai benar-benar menguasai permasalahan, dan akan lebih diterima apabila ia juga “orang” lapangan. Tidak hanya memahami melalui referensi-referensi tertulis, tetapi karena secara empiris ikut mengalami atau terlibat di dalamnya dan melihat langsung fakta-faktanya (Setia, 1993). Seringkali, dalam sebuah acara *dharma wacana* tidak dirasakan manfaatnya, karena seseorang tampil hanya bermodalkan berani, namun tidak menguasai masalah. Ada lagi, yang tampil hanya menyampaikan gagasannya, hanya curahan hati. Lebih jauh lagi, ada pedharma wacana yang tidak bisa membedakan antara materi yang dominan dengan adat, tradisi dan budaya, yang sebenarnya juga tidak salah, sepanjang ia mampu memaparkan bahwa itu kearifan lokal yang bersumber dari ajaran Hindu. Dalam sebuah acara yang diawali dengan dharma wacana, sekaligus seyogyanya juga menjadi semacam arahan terkait dengan acara yang sedang berlangsung (Sueca, 2018).

Berkaitan dengan data umat Hindu pada tahun 2020 jumlah pemeluk Agama Hindu mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Keberadaan data umat Hindu ini digunakan oleh penulis sebagai data awal jumlah umat yang ada di DKI Jakarta. Identifikasi ini oleh penulis dianggap sebagai tonggak awal dari permasalahan tentang dinamika penyuluh yang ada di DKI Jakarta. Adapun faktor internal dalam permasalahan awal adalah: 1) kuantitas penyuluh, 2) pengetahuan penyuluh, 3)

pengalaman penyuluh, dan 4) motivasi penyuluh. Dan faktor eksternal permasalahannya terdiri dari: 1) regulasi pemerintah dan 2) penghargaan umat. Berangkat dari hal ini maka yang menjadi pertanyaan kunci pada penelitian ini adanya Pokok permasalahan yang kemudian muncul adalah bentuk dinamika penyuluh agama Hindu di DKI Jakarta yang akan menjadi bahasan utama dalam tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yang menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu (Cresswell, 2015). Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data primer lainnya yaitu mencari informasi dengan melakukan wawancara dengan tokoh agama Hindu yang dipilih dan memahami penyuluhan mulai dari Kabubdit Penyuluhan Kemenag RI, Pembimas Hindu, tokoh umat ketua PHDI Provinsi dan Ketua PHDI 5 wilayah, penyuluh PNS dan Non-PNS. Sumber data skunder dalam penelitian ini didapat dari beberapa hasil penelitian tentang penyuluhan, buku-buku referensi tentang penyuluhan seperti hasil penelitian, jurnal, prosiding serta buku-buku terkait yang dianggap relevan untuk pengkajian penelitian ini. Teknik analisis data dengan model siklus melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pengadaan Penyuluh

Pendekatan Kebijakan yang telah dihasilkan oleh Direktorat Bimas Hindu Kementerian Agama RI yang kemudian tertuang dalam peraturan turunannya, merupakan capaian kinerja yang luarbiasa sekali. Kebijakan ini yang kemudian bermuara pada pembinaan umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia. Dengan adanya pembinaan ini maka, umat yang ada di daerah bahkan yang ada dipelosok desa dapat merasakan pembinaan secara berkala, terjadwal, dan berkelanjutan. Keadaan ini mengingatkan bahwa kitab suci Veda telah memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk mempelajarinya tanpa memandang, suku, budaya, ras, atau golongan tertentu. Pernyataan ini diperkuat dalam kitab Yajur Veda XXVI:2 yang menjelaskan bahwa:

Yathemām vācam kalyāṇīm āvadāni janebyah

Brahma rājanyābhyām sūdrāya cāryāya ca svāya cāraṇāya ca

Terjemahan:

Hendaknya disampaikan sabda suci ini kepada seluruh umat manusia, cendikiawan-rohaniawan, raja-pemerintah-masyarakat, para pedagang-petani-nelayan-buruh, kepada orang-orangku dan kepada orang asing sekalipun (Titib, 2007:3).

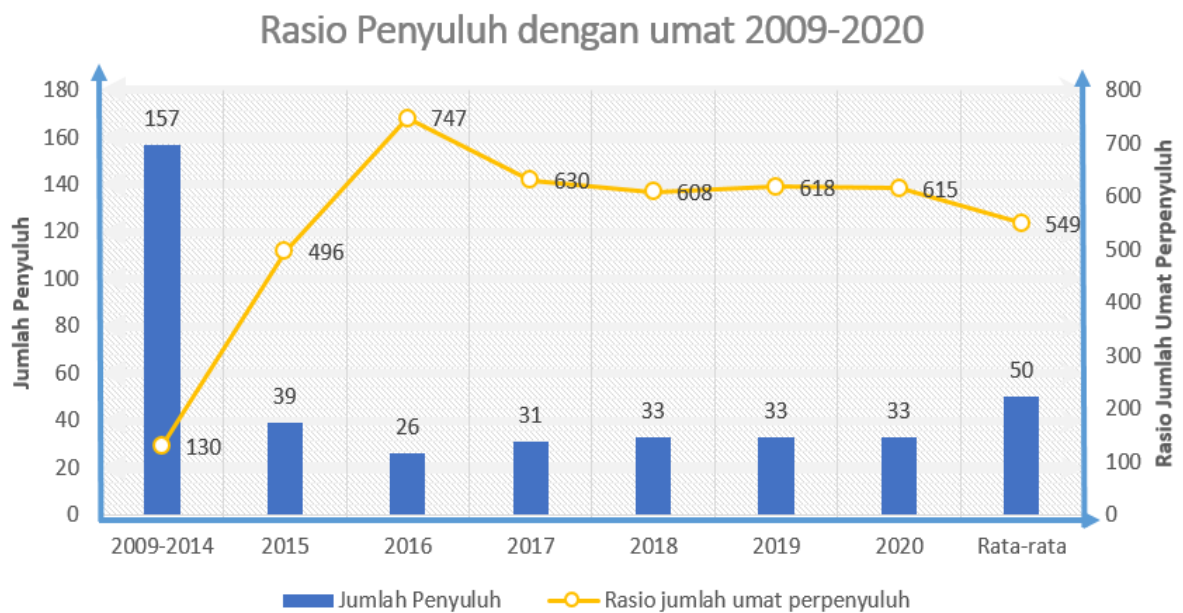
Bersandar dari mantram tersebut menunjukkan bahwa Veda bukanlah sebuah kitab suci yang menakutkan, atau sebuah kitab suci yang akan menyebabkan hal-hal yang buruk bagi pembacanya. Veda adalah sebuah kitab tentang pengetahuan teologis, Filosofis, ritual dan banyak lagi lainnya. Yajur Veda sendiri telah mengatakan bahwa ajaran Veda harus disampaikan dan bukannya disimpan atau dimonopoli kebenarannya oleh hanya satu golongan melainkan harus disebarkan kepada seluruh umat manusia. Tentunya dalam belajar Veda ini hal pertama yang harus dilakukan adalah harus belajar tentang Itihasa dan Purana sebagai modal yang hendaknya harus diketahui oleh setiap umat Hindu karena ajaran Veda sebagai pengetahuan yang suci dan tujuan dari pembelajaran itihasa dan purana adalah jangan sampai ajaran Veda ini disalahartikan dan ajarannya dibelokkan oleh orang yang hanya mengetahui ajaran Veda hanya sebagian kecil saja (Austin, 2015:340).

Dharma Pracharaka sebagai aset umat yang ada untuk itulah perlu perhatian dan peningkatan kualitas dari masing-masing penyuluh yang bersangkutan. Sikap dan antusias yang dimiliki oleh umat ini menunjukkan solidaritas sosial yang sudah ditumbuhkan dan tentunya harus dikembangkan dan dipupuk sebagai modal dalam pelaksanaan *Dharma Pracharaka* yang ada dalam kehidupan sosial keagamaan. Wujud nyata ini sebagai kekayaan mental dan untuk kemudian diharapkan menjadi modal intelektual dan sosial dan bahkan ada informan yang telah menjelaskan bahwa adanya penyuluh agama yang dapat membentuk karakter umat Hindu secara bertahap dan berkesinambungan. Penyuluhan yang ada di DKI Jakarta bahwa payung hukum tentang penyuluhan tertuang dalam:

1. Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 46 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembayaran Honorarium Penyuluh Agama Hindu Non Pegawai Negeri Sipi;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;

Payung hukum yang ada ini pada dasarnya telah membentuk tugas pemerintah yang dalam hal ini adalah Kemenpan RB, Kementerian Agama dalam hal ini adalah Ditjen Bimas Hindu untuk melakukan pembinaan kepada umat. Turunannya kemudian ketika Bimas Hindu Kanwil DKI Jakarta membentuk penyuluh Non PNS yang pada pelaksanaannya telah membantu tugas pembinaan Bimas Hindu dalam melakukan penyuluhan agama untuk menciptakan pemahaman dan kerukunan intern umat Hindu terutama yang ada di DKI Jakarta. Tingkatan dan persyaratan khusus penyuluh agama Hindu non PNS ini membawa perubahan pada kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pembimas Hindu DKI Jakarta mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2020 ini. Keadaan inilah Pembimas Hindu DKI Jakarta mengadakan penyuluh di DKI Jakarta untuk Non PNS dengan serangkaian persyaratan administrasi dan kelengkapan lainnya. Pada awalnya penyuluh masih bersifat sukarela, baru mulai dari 2009 sampai 2014 sudah mulai dibenahi aturannya Keputusan Menteri Agama 516 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya dan baru ditempatkan penyuluh dari tokoh umat sebagai penghargaan atas jasa dalam melakukan pembinaan yang merangkap sebagai tokoh umat, pinandita, pandita dan lainnya.

Penyuluh tahun 2019-2014 berjumlah 156, tahun 2015 berjumlah 38, 2016 berjumlah 25 dan pada tahun 2017 naik menjadi 30 penyuluh dan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 berjumlah 32. Untuk pengadaan jumlah penyuluh PNS mulai tahun 2000 adanya 1 penyuluh PNS yang bekerja rangkap sebagai pegawai bimas Hindu dari tahun 2000-2020 dan bahkan sampai saat ini tentunya rasio yang ada ini masih belum mencukupi. Keadaan inilah yang kemudian penyuluh PNS bekerja sambilan antar dirinya sebagai penyuluh dan pegawai di Kanwil Pembimas DKI Jakarta. Pada tahun 2015-2020 terjadi pengangkatan jumlah penyuluh yang jauh lebih sedikit hal ini karena 1) pembatasan jumlah penyuluh, 2) wilayah binaan yang diberikan berdasarkan jumlah pura, 3) ada kategori pengangkatan penyuluh. Keadaan ini tentunya tidak optimal lantaran administrasi yang kurang lengkap, kurang sumber dana, kurang sumber daya manusia, dan kurangnya komunikasi dengan pihak yang terkait. Penggambaran ini dapat dilihat dalam grafik rasio penyuluh dengan umat tahun 2009-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1 Rasio Penyuluh dan Umat Hindu Tahun 2009-2020

Sumber data: Dimodifikasi dari BPS DKI Jakarta dan Kanwil. Kemenag Pembimas
Hindu DKI Jakarta, 2020.

Upaya perampingan yang dilakukan oleh pembimas Hindu Kanwil DKI Jakarta membawa arah dan perubahan dalam proses penyuluhan Agama Hindu yang ada di DKI Jakarta. Merujuk dari data yang sudah disajikan menunjukkan bahwa keberadaan penyuluh yang ideal pada tahun 2009 sampai dengan 2014 sudah tercapai dengan adanya rasio antara penyuluh dan umat Hindu di wilayahnya rata-rata sudah tercapai dengan sangat baik. Akan tetapi, dengan munculnya regulasi baru ini menunjukkan bahwa ada perampingan yang dilakukan yang tentunya jika mengacu pada peraturan menteri agama dan Kepdirjen yang tertanda pada bulan September 2020 ada hal-hal yang harus diperhatikan.

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 153 Tahun 2020 yang tertuang dalam Bab VI tentang Wilayah binaan penyuluh yang menjadi amanat Negara maka harus diaplikasikan. Adapun wilayah binaan ini disebutkan bawah setiap penyuluh diwajibkan mempunyai wilayah binaan, wajib memiliki paling sedikit 2 kelompok binaan yang masing-masing terdiri dari 10 umat Hindu, dan memberikan pembinaan kepada kelompok binaannya paling sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu. Terkait dengan pelaporan maka, penyuluh wajib menyertakan laporan setiap bulan sesuai dengan ketentuan Kepdirjen tersebut dan melampirkan dokumentasi foto kegiatan. Konten permasalahan rekrutmen penyuluhan dan dinamika

yang terjadi dapat diurai dalam proses rekrutmen, keberadaan umat, penyuluh, dan kelompok penyuluh. Proses rekrutmen ini dilakukan dengan aturan yang sudah ada dan disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Keberadaan umat dan penyuluh merupakan dua hal yang beririsan karena berkaitan dengan pembinaan umat yang dalam hal ini terdiri dalam rasio 1:200 yang artinya satu penyuluh memberikan pembinaan kepada 200 umat dalam satu kecamatan yang kemudian diuraikan lagi dalam pembinaan kelompok binaan minimal 2 kelompok binaan yang masing-masing terdiri dari 10 umat. Tentunya pelaksanaan rekrutmen dan pembinaan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kelompok kerja penyuluh yang merupakan wadah forum penyuluh Hindu terutama yang ada di DKI Jakarta. Oleh karena itulah, keberadaan penyuluh ini sebagai garda terdepan dalam melakukan pembinaan umat yang secara komprehensif harus menguasai semua lingkup kehidupan yang tidak hanya bidang agama semata.

2. Program dan pembinaan penyuluh

Seorang *dharma paracharaka* hendaknya mempunyai metode penyampaian yang beranekaragam hal ini untuk menghindari kebosanan yang ada pada diri penonton. Tentunya metode penyampaian ini tidak bisa didapatkan secara instan melainkan dengan usaha dan berlatih. Mengingat tentang pelaksanaan ajaran pada masa Hindu kuno bahwa ajaran Veda yang telah disampaikan dengan duduk dekat guru untuk mendapatkan ajaran suci (*upanisad*), proses inilah yang telah dilakukan secara berabad-abad. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan jaman yang terus berubah metoda penyampaian secara upanisad hanya sebagian saja yang menggunakannya dan mereka lebih menggunakan kearah yang lebih modern. Bagi pemberi *Dharma pracharaka* perlu mempelajari metode sekaligus kontens (materi). Sampai titik ini pendharmawacana berperan sebagai seorang guru. Guru memiliki filsafat *teaching is art*, maka metode maka metode untuk menjadi pembicara menarik untuk diungkap sebagai salah satu kompetensi guru (Pricket, 1975:183). Kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang haikat perilaku guru yang penuh arti. Dimensi penuh arti ini memiliki makna luas dan dalam. Di sinilah sosok pendharmawacana beresonansi dengan ungkapan orang bijak perihal *The power of Kind Speaking*, tentang aspek berkomunikasi, berbicara baik dapat menjadi kekuatan pendorong (Titib, 2005:34).

Berbicara baik di pagi hari, karena hal itu akan menerangi perhatian hari itu dan menjadikan pekerjaan rumah menjadi lancar. Lalu berbicara dengan hati yang murni

diharapkan terjadi di dalam rumah. Untuk itu diperlukan pula pengalaman yang mantap. Program penyuluhan ini harus bersifat komprehensif dan terukur termasuk didalamnya adalah adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Penyuluh harus mampu memahami kebutuhan keumatan sehingga materi yang disampaikan ini sesuai dengan kondisi umat. Selain itu, bahwa harus ada koordinasi dengan lembaga keagamaan yang ada di tubuh Hindu agar pembinaan ini merangkul seluruh elemen umat, termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyuluhan di wilayah binaan. Dengan adanya ajakan yang bersifat positif ini maka, pembinaan yang diharapkan dapat terwujud dengan adanya program penyuluhan yang dilakukan secara berkala dan terprogram. Program penyuluhan yang telah dicanangkan ini belum optimal dilakukan lantaran karena birokrasi pemerintahan, adanya kepentingan lain, kurangnya *political will* dari pimpinan dalam mengelola kinerja Pokjalah di DKI Jakarta.

3. Reproduksi Sosial: Komunikasi Penyuluh Agama Hindu Dengan Umat

Sikap dalam melakukan komunikasi membawa dampak yang sangat baik yang dalam hal ini tentunya ada strategi komunikasi yang harus dilakukan. Hal ini pernah ditulis oleh Harold D. Lasswell dengan judul "*The Communication of ideas*" yang dalam hal ini untuk menyampaikan komunikasi perlu adanya ketentuan dari komunikator, media yang digunakan, pendengar, akibat yang ditimbulkan. Pembicaraan Lasswell tentang efek yang dihasilkan dapat berdampak kepada penyebaran informasi, ajakan atau persuasi dan pelaksanaan suatu instruksi. Dengan demikian, sikap inilah yang berkaitan dengan adanya faktor fundamentalis yang berkaitan dengan kebenaran yang terjadi secara empiris melainkan juga kebenaran yang dilakukan secara abstrak (Bakker, 2013:40). Tentunya dalam menentukan sikap inilah yang juga ditentukan oleh kebenaran secara intuitif yang dalam hal ini didapatkan dengan cara menyelami pengalaman dunia yang diperoleh dengan menjadikan hal yang sangat penting dalam setiap tindakan manusia baik itu secara pikiran, perkataan dan perbuatan yang untuk kemudian menjadi hal yang sangat penting mewujudkan rasional dalam kehidupan ini (Effendy, 2003:302).

Berkaitan dengan sikap inilah yang kemudian, erat dengan interaksi sosial yang dalam pendapat M.Z. Lawang (1986) menyebutkan bahwa suatu proses saling melakukan komunikasi dalam upaya untuk saling mempengaruhi dalam hal pikiran dan tindakan. Peranan interaksi ini sebagai modal dalam melakukan hubungan yang selaras dengan sesama manusia yang kemudian menjadi hal yang utama dalam menjalin komunikasi dengan sesama manusia. Hal ini kemudian menjadi pembahasan yang utama

dalam penelitian ini tentang reproduksi sosial yang tercipta lantaran ada interaksi antara penyuluh dengan umat yang ada di wilayah binaannya. Pemikiran ini dikemukakan oleh Gidden sebagai bentuk *society centered* yang mengedepankan adanya relasi masyarakat dalam komunitas kehidupan dan seluruh elemen masyarakat lainnya (Soyomukti, 2013:315).

Komunikasi yang dibangun adalah upaya pembaharuan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Komunikasi yang dibangun antara penyuluh dengan umat adalah dengan pola komunikasi yang melibatkan interaksi yang inten. Penyuluhan yang dilakukan ini adalah sebagai bentuk reproduksi sosial yang dilakukan dalam melakukan pembinaan yang menyesuaikan dengan keadaan budaya, waktu, tempat, dan keadaan. Penyuluhan yang dilakukan sebagai bentuk adaptasi dari keadaan yang kemudian menjadikan terjadinya prinsip pemaknaan dan pengorganisasian dari praktik sosial yang berlangsung dan menjadi reproduksi praktik sosial baru. Penyesuaian dari reproduksi sosial penyuluh adalah adanya proses pembinaan yang dilakukan secara berkala dan menyampaikan sesuai dengan kebutuhan umat, sehingga terjadi adanya praktik sosial yang menyesuaikan situasi yang ada.

4. Kedudukan Penyuluh Sebagai Aktor Sosial

Umat Hindu menghadapi perkembangan jaman yang penuh dengan persaingan. Keadaan ini sebagai keadaan yang nyata dialami oleh umat Hindu baik yang ada di daerah maupun yang ada di kota. Pada awalnya seolah-olah umat Hindu masih banyak yang bersuara keras namun dalam kelompoknya sendiri, namun ketika berada di luar mereka diam seibu bahasa. Fakta ini pernah dituliskan oleh Putu Setia (1993) yang saat ini sudah menjadi pedanda yang menjelaskan bahwa umat Hindu pada era tahun 90-an dikompilasi tentang permasalahannya yaitu ajaran, adat, sulinggih dan lembaga umat. Oleh karena itulah, hal yang harus dilakukan dalam pembinaan umat ini kembali pada ajaran sastra. Dalam hal ini misalnya dalam hal pembinaan umat dalam *dharma tula* yang harus menyangkut prinsip, yaitu: 1). *Sastravada* yaitu setiap pembicaraan mengenai masalah ajaran agama haruslah didasarkan pada ketentuan-ketentuan kitab suci Veda dan kitab-kitab sastra lainnya. 3). *Budhivada* yaitu berbicara dalam dharmatula untuk mendalami ajaran agama Hindu hendaknya berbicara berdasarkan kesadaran budhi yang jernih dan tidak boleh berbicara berdasarkan dorongan emosi yang tamasik dan rajasik. Sastra agama akan menjadi kabur kalau dikemukakan dengan cara yang emosional tamasik dan rajasik tersebut. 3) *Premavada* yaitu berbicara soal-soal agama hendaknya didasarkan pada kasih

sayang yang mengalir dari diri pribadi yang bersih dan suci. Tidak didasarkan pada kebencian pada seseorang atau kelompok tertentu. Kalau kebencian dijadikan dasar untuk berbicara maka sastra agamanya menjadi hilang tuahnya dan tidak akan memberikan kewibawaan kepada pembicaranya.

Pembicaraan ini diketengahkan karena harapan umat kedepan bahwa ketika melakukan proses pembinaan tidak hanya menggunakan kebenaran secara ego pribadi yang akhirnya berujung pada membenaran pendapat. Akan tetapi, hal yang dimaksud dengan penyampaian ajaran agama harus berlandaskan sesuai dengan dharma (Mcgregor, 1973:70). Karena dalam penyampaian ini kata-kata memegang peranan penting untuk itulah Bhagavan Sri Satya Narayana pernah mengatakan bahwa: lidahmu bertanggung jawab pada 4 kesalahan besar yaitu: 1) Berdusta, 2) membicarakan kesalahan orang, 3) mencaci maki, dan 4) berbicara tidak susila, empat kesalahan ini harus dihindarkan bila santih harus ada bagi pribadi sendiri ataupun di dalam pergaulan masyarakat. Perkataan dari Bhagavan ini menunjukkan bahwa berbicara yang berkualitas menunjukkan pribadi dari orang yang bersangkutan. Hal berkaitan dengan wicara juga dijelaskan dalam wahyu Veda yang telah lebih awal menyadari hakekat penting dari wicara seperti dijelaskan dalam mantra pada kitab Rg Veda X.71.1-2 yang menjelaskan bahwa:

*brhaspate prathamam vāco agram yatprairata nāmadheyam dadhānāḥ,
yadeṣām śreṣṭham yadaripramāṣītprenā tadeṣām nihitam guhāvih.
saktumiva tita-unā punanto yatra dhīrā manasā vācamakrata, atrā sakhāyah
sakhyaṇi jānate bhadraiṣām lakṣmīrnihitādhi vāci*

Terjemahan:

Brhaspati, adalah yang menjadi penguasa Sabda yang pertama kali memberikan nama kepada setiap objek; adalah kata yang terbaik dari kata-kata itu dan yang terbebas dari cela, (Sarasvati) menunjukkan hal itu meskipun tertanam secara rahasia, karena welas asihnya. Ketika yang bijak menciptakan kata-kata melalui kemampuan pembedaan, penyaringan, seperti manusia mengayak tepung memisahkannya dari yang bukan tepung, maka teman akan menyadari persahabatan; dan nasib baik akan selalu menyertai kata-kata mereka (Maswinara, 2005:857).

Petikan mantra ini menunjukkan bahwa peranan wicara yang ada dalam kehidupan ini menunjukkan bahwa sebagai modal untuk melakukan komunikasi dengan umat yang

ada. Komunikasi ini harus dipertahankan karena menuntut kecakapan dan kualitas sebagai modal persiapannya. Hal lain juga, dijelaskan dengan rinci bahwa keberadaan *Dharma Pracharaka* ini sangat sekali diharapkan untuk melakukan pembinaan dalam menghadapi arus perubahan yang terjadi. Keadaan ini menunjukkan bahwa adanya perubahan kehidupan dari arus perubahan yang senyap tetapi masif yang masuk dalam segala elemen kehidupan. Elemen kehidupan yang paling nampak adalah perubahan sosial masyarakat, Globalisasi dalam pandangan Giddens tidak hanya berpengaruh pada ruang yang makro tetapi pada ruang mikro, seperti keluarga (Harnadi, 2021:75).

Kompleksitas dari tumbuh kembangnya globalisasi membebaskan konsekwensi logis dari berkehidupan, inilah kenapa Giddens menganggap globalisasi sebagai keniscayaan yang nyata dari segala lini kehidupan. Konsekwensi yang dihasilkan dari diskursus globalisasi ini, *pertama*, globalisasi tidak hanya membangun hirarki baru, tetapi globalisasi mengakuksi tatanan masyarakat akar rumput. *Kedua*, melahirkan budaya baru yang bersifat global, tetapi juga merangsang budaya nasionalisme lokal. *Ketiga*, basis ekonomi multinasional, tetapi juga membangun zona ekonomi regional. Perubahan yang terjadi inilah yang mengakibatkan perubahan dalam bentuk struktur dan nilai yang bersifat holistik. Kebijakan yang ada ini melahirkan serangkaian proses penyuluhan mulai dari rekrutmen, pelaksanaan seleksi, proses penyuluhan, pelaporan dan evaluasi kegiatan. Keadaan penyuluhan baik regulasi dan rekrutmen serta program yang berjalan ini masih perlu mendapatkan perhatian lebih terutama pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Hal lain adalah program kelompok kerja penyuluh yang harus dilakukan pembahasan dan adanya koordinator tingkat provinsi untuk melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk merumuskan sasaran, tujuan capaian, materi penyuluhan, target yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, dalam pelaksanaan penyuluhan ini penyuluh ditengah keterbatasannya dalam melakukan pembinaan selalu beradaptasi dalam situasi dan kondisi yang terjadi baik dari medianya, waktu penyuluhan, anggaran yang didapatkan dan penggunaan teknologi dalam mendukung proses pembinaannya.

Bentuk dinamika penyuluh yang lain adalah penyuluh sebagai aktor sosial yang terjadi lantaran adanya faktor kualitas penyuluh, kuantitas penyuluh, ruang dan waktu penyuluhan dan adaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan demikian, dalam hal pengadaan penyuluh dan juga menjalankan program pembinaannya sebagai bentuk relasi komunikasi, wilayah binaan dan norma yang berlaku dan akhirnya melahirkan

kesadaran individu penyuluh dalam melakukan pembinaan sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu, penyuluh sebagai aktor sosial yang mampu memahami kebutuhan umat dalam melakukan penyuluhan baik dari segi materi pembinaan dan keadaan umat dari berbagai segi serta menunjukkan keteladanan dalam kehidupan sosial keagamaan. Dimensi signifikansi yang ada sebagai bagian dari pengakuan dalam masyarakat juga di dukung tentang adanya *role model* penyuluh dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya dimensi signifikansi ini maka, dibangun kesadaran bahwa penyuluh mempunyai kompetensi personal, substantive, metodologis, dan administrative, kreatif dalam proses pembinaan serta mampu menjalin gotong royong dalam lingkup kebersamaan.

Gambar 2: Model Bentuk Dinamika Penyuluh



Sumber: Penulis, 2021.

Dengan demikian, bentuk dinamika penyuluh yang terjadi di DKI Jakarta adalah kebijakan pemerintah sebagai dimensi legitimasi yang mengatur proses penyuluhan yang melingkupi proses rekrutmen, hak dan kewajiban penyuluh, dan wilayah binaannya. Kemudian, program penyuluhan dimensi otoritatif mengacu pada kebutuhan umat, kompetensi penyuluh, dan *problem solving*, pemetaan dan kebutuhan umat pada setiap wilayah sehingga mudah untuk dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pihak terkait. Selanjutnya, Reproduksi sosial menjadi hal yang harus dilakukan oleh penyuluh terutama dalam menjalin komunikasi dengan sesama penyuluh, pembimas, dan umat yang ada di wilayah binaannya. Hal ini untuk memaksimalkan fungsi penyuluh dalam pembinaan

umat. Dan sebagai actor sosial yang dengan kesadaran personal mempunyai kemampuan personal dan sosial dalam melakukan pembinaan. Untuk lebih memperjelas tentang bentuk dinamika penyuluh ini dapat digambarkan dalam bentuk gambar berikut.

SIMPULAN

Dinamika penyuluh yang terjadi di DKI Jakarta terjadi kebijakan penyuluh (baik regulasi, rekrutmen, sebaran, dan wilayah binaan penyuluh), program penyuluh, reproduksi sosial, dan eksistensi penyuluh. kebijakan pemerintah sebagai dimensi legitimasi yang mengatur proses penyuluhan yang melingkupi proses rekrutmen, hak dan kewajiban penyuluh, dan wilayah binaannya. Kemudian, program penyuluhan dimensi otoritatif mengacu pada kebutuhan umat, kompetensi penyuluh, dan *problem solving*, pemetaan dan kebutuhan umat pada setiap wilayah sehingga mudah untuk dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pihak terkait. Selanjutnya, Reproduksi sosial menjadi hal yang harus dilakukan oleh penyuluh terutama dalam menjalin komunikasi dengan sesama penyuluh, pembimas, dan umat yang ada di wilayah binaannya. Hal ini untuk memaksimalkan fungsi penyuluh dalam pembinaan umat. Dan sebagai actor sosial yang dengan kesadaran personal mempunyai kemampuan personal dan sosial dalam melakukan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, I. G. A. P. D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Penyuluh Agama Hindu di Kecamatan Denpasar Selatan. *Penelitian Agama Hindu*, 2(2), 10–22.
- Atmadja, N. B. (2010). *Genealogi Keruntuhan Majapahit Islamisasi, Toleransi, dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali* (I). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakker, F. (2013). Comparing the Golden Rule in Hindu and Christian Religious Texts. *Studies in Religion. Sciences Religieuses*, 42(1), 38–58.
- CR. Austin. (2015). Book Review: Heroic Krsna: Friendship in Epic Mahabharata. *Studies in Religion. Sciences Religieuses*, 44(3), 399–402.
- Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*. (S. Z. Qudsy, Ed.) (III). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, Teori Dan Filsafat Kemanusiaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harnadi, D. (2021). Menakar Potensi Sosiologi Hukum sebagai Pendekatan Perdamaian: Pembacaan dari Perspektif Struktural Giddens. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1), 70–83.
- Harnika, N. N. (2021). Efektifitas Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Hindu Non PNS Dalam Membina Keluarga Dharmika Di Kota Mataram. *Ganec Swara*, 15(2), 1140–1146.
- Maswinara, I. W. (2005). *Veda Sruti Rg Veda Samhita Resensi Dari Sakala Mandala X*.

- (Dewanto, Ed.). Surabaya: Paramita.
- Mcgregor, F. B. (1973). Ethical Standards in World Religions: II. Hindu Ethics in Theory and Practice. *The Expository Times*, 85(3), 68–72.
- Prickett, J. (1975). Is the New Religious Education a Betrayal. *The Expository Times*, 86(6), 183–184.
- Rahmawan, D., & Wibowo, S. Kunto Adi, Maryani, E. (2018). Pelatihan Literasi Media Sosial Terkait Penanggulangan Hoaks Bagi Siswa Sma Di Kabupaten Bandung Barat. *Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAD*, 2(12), 1021–1024.
- Setia, P. (1993). *Kebangkitan Hindu : Menyongsong Abad ke-21*. Jakarta: Manikgeni.
- Soyomukti, N. (2013). *Pengantar Sosiologi : Dasar Analisis, Teori Dan Pendekatan Menuju Analisis Masaalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial Dan Kajian Strategis*. Yogyakarta: Ar-ruz Media.
- Sueca, I. N. (2018). Penguatan Budaya Kerja Penyuluh Agama Non-Pns Dalam Pembinaan Umat Hindu Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 5(2), 51–61.
- Sugiman dan I Nyoman Santiawan. (2020). Kinerja Penyuluh Agama Hindu Non Pns Ditinjau Dari Fungsi Penyuluh Di Masa Pandemi Covid-19. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 25(2), 153–163.
- Tim Penyusun. (2011). *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PHDI Pusat*. Jakarta: PHDI Pusat.
- Titib, I. M. (2007). *Veda Sabda Suci (Pedoman Prakris Kehidupan)*. (Edisi I). Surabaya: Paramita.
- Titib, I Made, M. S. dkk. (2005). *Petunjuk praktis pelaksanaan Dharma Wacana*. Surabaya: Paramita.
- Triguna, Y. I. B. G. (2011). *Mengapa Bali Unik*. Jakarta: Jurnal Keluarga.